KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 N	A.1 NPWP : 68 807 593 6 722 000								
A.2 N	A.2 NIK :								
A.3 Nama : NS RAHMAWATI									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJA		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
1 21-402-01			35.834.800	35.834.800	0	15	5.375.220		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 6									
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor: Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan:  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5						
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		KUMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 C.4	C 4 Tanggal		2 6				ШШ		
C.5				dd 0 1 mm	2 0 2 2 уууу				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : De			Dengan	HARI JUMADI  Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.					

8X269Z02